

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada zaman Dinasti Abbasiyah masa kepemimpinan Khalifah Harun Arrasyid (786-809) dikenal dengan masa *The Golden Age of Islam* atas kemakmuran dan kemajuan ekonomi yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan negara serta rakyat karena pemikiran Abu Yusuf sebagai salah satu ekonom muslim pada masa itu. Abu Yusuf ditunjuk oleh Khalifah Harun Arrasyid untuk menyusun Kitab Al-Kharaj (Apriyanto, 2020). Dalam pemikirannya, pemerintahan memiliki tugas utama untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat dengan mengutip pernyataan Umar bin Khatab yang mana sebaik-baik pemerintahan adalah yang memerintah dan memimpin demi kesejahteraan rakyatnya dan seburuk-buruk pemerintahan adalah yang memerintah dan memimpin namun rakyatnya mendapati kesulitan (Oky, 2019).

Pemikiran tersebut tertuang di dalam Kitab Al-Kharaj yang berbicara terkait ekonomi publik dan tugas negara dalam pembangunan, serta dasar-dasar kebijakan fiskal yang mana dilandaskan pada *maslahah* dan keadilan. Kitab Al-Kharaj ini kemudian dijadikan pedoman keuangan negara secara syariah dan petunjuk administratif dalam pengelolaan *baitul mal* guna tercapainya kehidupan negara yang makmur dan tidak ada yang merasa terzhalimi pada zaman kepemimpinan Khalifah Harun Arrasyid (Oky, 2019). Pada pengelolaan keuangan negara, Abu Yusuf sangat mendukung tinggi taraf kewajaran, keadilan, dan pentingnya akuntabilitas. Abu Yusuf selalu menegaskan akan pentingnya pemenuhan keperluan masyarakat dan meningkatkan pengembangan berbagai proyek yang bertujuan pada kesejahteraan publik. Dalam Kitab Al-Kharaj juga tertuang bagaimana pengumpulan dan pendistribusian setiap pendapatan negara sesuai dengan prinsip Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (dalil naqli) dan rasional para ulama (dalil aqli)(Tilopa, 2017).

Negara Indonesia juga memiliki tujuan untuk melindungi rakyatnya dan mengembangkan kesejahteraan umum seperti yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan

tersebut dapat diukur dari beberapa bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keberadaan sosial, bidang pendidikan, dan bidang jaminan sosial. Bidang-bidang tersebut merupakan bidang yang biasanya dijadikan patokan bagi masyarakat bahwa telah mencapai kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2022). Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan namun masih menjadi salah satu persoalan serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia karena setiap negara memiliki tujuan untuk dapat melindungi dan mensejahterahkan masyarakatnya. Terdapat 4,69% penduduk miskin DKI Jakarta pada tahun 2022 yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 4,72% mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 4,53%. Kesejahteraan merupakan tujuan hidup bagi masing-masing manusia di muka bumi. Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah melakukan pengelolaan pendapatan negara oleh APBN dan APBD untuk pengelolaan pendapatan daerah (Badan Pusat Statistik, 2022).

Sebagian besar pemasukan sumber pendapatan yang tertera di APBN pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah berasal dari sektor pajak. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, reformasi perpajakan di Indonesia dimulai. Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem perpajakan sehingga pemasukan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat secara signifikan guna dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perpajakan dapat disebut dengan sumber pendapatan negara terbesar. Lebih dari 50% pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari pajak. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 mencapai Rp 40.298.133.505.326 (64,68% dari total pendapatan daerah). Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak menurun dikarenakan adanya pandemi covid yaitu sebesar Rp31.895.263.277.623 (57,07% dari total pendapatan daerah). Pada tahun 2021 penerimaan pajak mencapai Rp34.575.563.219.175 (52,73% dari total pendapatan daerah) (PPID DKI Jakarta).

Kajian literatur tentang pemikiran Abu Yusuf dan kesejahteraan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti halnya pada

penelitian Syamsuri dan Prastyaningsih (2018) dengan mengangkat judul Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf di Indonesia dijabarkan bahwa terdapat sebagian relevansi konsep perpajakan Abu Yusuf dengan model perpajakan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu: muqosamah seperti PBB dan PPN, qabalah seperti sistem *self assesment* yang telah dilaksanakan di Indonesia, pajak kharaj seperti PBB, usyur seperti bea cukai, dan penyedia fasilitas umum serta pengelolaan keuangan publik lewat APBN dan BUMN (Syamsuri & Prastyaningsih, 2018). Kemudian penelitian Rudiyanto (2021) dengan judul Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf dan Implementasinya di Indonesia menemukan pandangan Abu Yusuf terkait keuangan publik yang dapat diuraikan menjadi tiga sumber penerimaan utama yaitu shadaqah, ghanimah, dan fa'i yang mana didalamnya termasuk juga jizyah, ushr, dan kharaj, serta menganggap bahwa segala sumber daya merupakan amanah dari Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sehingga harus efisien dalam penggunaannya (Rudiyanto, 2021).

Penelitian Mukaromah & Rizal (2021) yang berjudul Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dengan Mekanisme Pasar Modern menunjukkan bahwa Abu Yusuf memiliki pandangan yang tidak sama dengan pandangan masyarakat dari sisi mekanisme pasar, Abu Yusuf juga tidak sejalan dengan pemerintah dalam penetapan harga namun ia mengizinkan adanya intervensi harga di pasar pada saat keadaan tertentu, sehingga pemerintah hanya bertugas sebagai regulator dalam mekanisme pasar (Mukaromah & Rizal, 2021). Penelitian yang dilakukan Syamsuri, dkk (2021) dengan judul Strategi dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah Kritis dari Kitab Al-Amwal menyebutkan bahwa terdapat beberapa sumber pemasukan keuangan suatu negara, yaitu: khumus, kharaj, zakat, fa'i, dan jizyah, serta tak adanya nol tarif di perdagangan internasional, dan cukai untuk bahan makanan yang lebih murah dengan syarat-syarat tertentu untuk dapat dikenakan cukai. Konsep pemikiran APBN Abu Ubaid dengan APBN yang terdapat di Indonesia pada saat ini justru sangat berbeda karena pada zaman pemerintahan Abu Ubaid, pusat pengelolaan keuangan ada di baitul maal dan baitul maal memiliki tugas untuk harus menyediakan jaminan standar kepada masyarakat muslim (Syamsuri dkk., 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Matitaputty dkk (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat mengatakan bahwa pajak dinilai cukup membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berhasil menurunkan angka penduduk miskin dengan pengaruh 47% yang mana setiap Rp100.000.000 dari penerimaan pajak akan dapat menurunkan 1 orang dari penduduk miskin, dan berhasil meningkatkan pendapatan perkapita dengan pengaruh 98% karena pendapatan negara yang bersumber dari pajak masih kurang maksimal, sehingga masih terdapat banyak potensi penerimaan pajak yang masih belum dilihat oleh pemerintah (Matitaputty dkk., 2021). Penelitian Anto Apriyanto (2020) dengan judul Kesejahteraan Ummat dan The Golden Age of Islam Telaah Historis Pemberdayaan Masyarakat di Masa Khalifah Harun Al-Rasyid menggambarkan tentang peradaban Islam yang maju sedemikian pesatnya pada saat era Daulah Abasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun Al-Rasyid yang mana negara mengedepankan perhatian utama untuk kesejahteraan rakyat terkhusus pada bidang pendidikan baik itu peserta didik, pengajar, pembiayaan untuk pendidikan, fasilitas pendukung pendidikan, maupun alat yang mendukung pendidikan. Kejayaan tersebut lahir dari perkembangan bidang perekonomian yang cukup pesat karena penerapan sistem metode ekonomi Islam yang menjadi ciri khas pada saat itu (Apriyanto, 2020).

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, mayoritas kajian mengenai pemikiran Abu Yusuf membahas bagaimana pengelolaan keuangan Abu Yusuf dan relevansi pengelolaan keuangan tersebut di Indonesia. Sedangkan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif membahas bagaimana pemikiran Abu Yusuf tentang kesejahteraan masyarakat dan relevansi pemikiran Abu Yusuf tersebut dengan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Penentuan objek penelitian terfokus pada tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Lokasi tersebut dipilih karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup pesat dan sebagai provinsi yang memiliki penerimaan pajak daerah terbesar di Indonesia yang mana menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan daerah. Sehingga DKI Jakarta berpotensi cukup besar dalam hal penyaluran pendapatan pajaknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan membuat batasan masalah guna dapat lebih fokus terhadap tema yang ingin penulis angkat. Adapun fokus pada penelitian ini adalah terletak pada analisis pemikiran Abu Yusuf dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berlandaskan dari latar belakang yang penulis jabarkan sebelumnya, permasalahan utama yang ingin penulis angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta telaah pemikiran Abu Yusuf yang tertuang di dalam Kitab Al-Kharaj. Sedangkan untuk rumusan masalah yang lebih spesifik pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abu Yusuf tentang kesejahteraan di dalam Kitab Al-Kharaj?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abu Yusuf di dalam Kitab Al-Kharaj dengan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk kepada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf tentang kesejahteraan di dalam Kitab Al-Kharaj.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Abu Yusuf di dalam Kitab Al-Kharaj dengan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan komparasi pemikiran yang sudah dipelajari dari masa ke masa sehingga dapat menambah referensi dalam mempelajari hal yang berkaitan dengan pemikiran Abu Yusuf terkait kesejahteraan terkhusus dalam hal analisis tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dalam tinjauan Abu Yusuf untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi materi acuan dan penilaian untuk penelitian yang semacamnya sehingga kedepannya dapat diberikan saran dan masukan untuk menyemprunakan penelitian.